

KOLABORASI MODEL *PENTAHHELIX* DALAM UPAYA PENANGANAN BENCANA WABAH COVID-19 DI KABUPATEN BOJONEGORO

Fikky Ardiansyah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

fikky.17040674062@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Wabah COVID-19 memberikan dampak signifikan bagi Indonesia, bukan hanya pada sektor kesehatan tetapi juga sektor lain. Situasi yang semakin memburuk membuat Indonesia mengambil keputusan untuk mengkategorikan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Sejak kasus pertama muncul, upaya penanganan bencana wabah COVID-19 terus dilakukan salah satunya melalui kolaborasi model *pentahelix* yang bersifat kedaerahan. Dengan kolaborasi tersebut, menuntut pemerintah daerah untuk siap menjadi *leading* dalam memerangi wabah COVID-19 di daerahnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi model *sequential exploratory*. Pada tahapan kualitatif teknik analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Sedangkan pada tahapan kuantitatif teknik analisis data menggunakan skala *likert*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur pada kolaborasi model *pentahelix* turut berkontribusi dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro, dan masyarakat Bojonegoro juga menyetujuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari garis kontinum yang menunjukkan hasil sebagai berikut, butir pernyataan 1 sampai butir pernyataan 15 terletak pada daerah setuju (S), kecuali pada butir pernyataan 8 yang terletak pada daerah ragu-ragu (RR). Butir pernyataan 7 dan 8 merupakan pernyataan untuk menguji hipotesis terkait kontribusi akademisi (guru/pendidik) pada konsep pembelajaran selama pandemi. Walaupun hasil pernyataan 8 terdapat pada daerah ragu-ragu (RR), namun peran akademisi sebagai konseptor masih bisa dikatakan baik karena pada butir pernyataan 7 masih berada pada daerah setuju (S). Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur akademisi (guru/pendidik) berperan dalam membuat konsep pembelajaran selama masa pandemi, tetapi implementasinya masih belum efektif.

Kata Kunci: *Pentahelix, Penanganan Bencana, Wabah COVID-19.*

Abstract

The COVID-19 plague has a significant impact on Indonesia, not only on the health sector but also other sector. The worsening situation led Indonesia to take the decision to categorize the COVID-19 plague as a national disaster. With this collaboration, demanding local government to ready to be leading in fighting the COVID-19 plague in their region. Therefore, researcher are interested in conducting research related to the *pentahelix* model collaboration in an efforts handling the COVID-19 plague in Bojonegoro. The research used a combination method of sequential exploratory models. At the qualitative stage of data analysis technique using model put forward by Miles and Huberman. While at the quantitative stage of data analysis techniques using the likert scale. The result showed the five element in the *pentahelix* model collaboration contributed to efforts to handling the COVID-19 plague disaster in Bojoengoro, and the Bojogoro society also agreed. That can be seen form the continuum lines are show the following result, statement 1 to 15 is located in the agreed area (S), except in statement item 8 located in the area of doubt (RR). Statement items 7 and 8 are to test hypotheses related the contribution of academics element (teachers/educator) to be conceiver of learning during pandemic. Although the result of statement 8 in the area of doubt (RR), but the role of academic element as conceiver can still be said good because in the result of statement 7 is still in the agreed area (S). So can be concluded that academic element (teacher/educator) play role in creating the concept of learning during pandemic, but the implementation is still ineffective.

Keywords: *Pentahelix, disaster management, COVID-19 plague.*

PENDAHULUAN

Virus COVID-19 muncul kali pertama di Kota Wuhan, China pada Desember tahun 2019 dan telah menyebar hampir keseluruh belahan dunia. Merespon kondisi tersebut, berselang beberapa bulan setelahnya yaitu, pada tanggal 11 Maret 2020 akhirnya *World Health Organisation* (WHO) secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 menjadi pandemi berskala global. Negara-negara di dunia juga mengambil beberapa kebijakan seperti, *lockdown*, *social distancing*, penutupan sekolah dan lainnya. Dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya kerumunan massa (Gössling dkk, 2020:2). Di Indonesia sendiri, pada tanggal 2 Maret 2020 telah mengumumkan kasus COVID-19 pertamanya. Setelah pengumuman tersebut, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat secara tajam. Seiring penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat, membuat presiden Indonesia mengambil keputusan untuk mengkategorikan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, ketetapan ini tertuang dalam Keppres No. 12 tahun 2020.

Dengan situasi dan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia dituntut untuk segera membentuk dan menetapkan kebijakan sebagai langkah konkret dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menyerukan untuk melakukan aktifitas sehari-hari dari rumah masing-masing atau *Work Form Home* (WFH). Selain seruan untuk WFH, beberapa kota juga mengambil kebijakan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemenkes RI juga telah mengeluarkan peraturan turunan untuk lebih memperjelas Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB yang termaktub dalam Permenkes RI No. 9 tahun 2020 mengenai pedoman dalam menerapkan PSBB sebagai upaya percepatan penanganan virus COVID-19 (Megasari dkk, 2020:213).

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sempat membuahkan angin segar yaitu, penurunan tren kasus positif (*positivity rate*). Namun hal itu tidak berlangsung lama bahkan pada tanggal 3 Desember 2020 lalu terjadi lonjakan kasus baru secara signifikan yaitu sebanyak 8,369 kasus. *Update* data pada 16 Desember 2020 juga memperlihatkan kasus baru masih bertambah secara signifikan yaitu, sebanyak 6,725 kasus. Peningkatan kasus baru secara signifikan tersebut menjadi tamparan keras bagi semua pihak bukan hanya pemerintah saja. Baik pemerintah maupun masyarakat dan juga *stakeholder* lain harus saling mendukung dan berkolaborasi agar pandemi ini segera berakhir. Pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa sejak 21 November sampai 16 Desember 2020 kasus terkonfirmasi baru selalu mengalami peningkatan yang

tinggi. Dari data tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan intensitas dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 serta indikasi lain yaitu, menurunnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus COVID-19.

Tabel 1. Perkembangan Kasus Covid-19 Nasional

Tgl/Bulan/2020	Penambahan Jumlah Terkonfirmasi	Penambahan Jumlah Kesembuhan
21 November	+4.998	+3.403
25 November	+5.534	+4.494
29 November	+6.267	+3.810
03 Desember	+8.369	+3.673
07 Desember	+5.754	+4.431
11 Desember	+6.310	+4.911
15 Desember	+6.726	+5.699
16 Desember	+6.725	+5.328

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2021

Hal tersebut harusnya dapat dijadikan evaluasi oleh *stakeholder* terkait yang bertanggungjawab dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, masyarakat juga harus meningkatkan kembali kesadaran akan bahaya virus COVID-19. Dari data pada tabel 1 juga menunjukkan sejak tanggal 21 November sampai 16 Desember 2020 kasus baru yang terkonfirmasi selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kesembuhan. Hal ini semakin mempertegas bahwa perlu adanya peningkatan kembali upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Indonesia. Dari data di atas juga dapat ditarik satu benang merah bahwa, Indonesia termasuk negara dalam kategori kasus COVID-19 yang tinggi. Hal tersebut diperkuat juga oleh pendapat Sunuantari (2020:1) yang mengatakan jika pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, hal ini didasari dengan melihat data di beberapa daerah yang menunjukkan lonjakan orang yang terpapar virus COVID-19 bahkan sampai berujung kematian.

Sampai tanggal 17 Desember 2020, jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai 643,508 dengan tambahan 7,354 kasus baru yang terkonfirmasi. Kasus yang masih aktif atau dalam perawatan berjumlah 97,139 kasus dengan presentasi 15% dari total kasus terkonfirmasi. Sedangkan kasus yang telah sembuh mencapai 526,979 dengan presentasi 81,9% dari total kasus terkonfirmasi dan total 19,390 kasus meninggal dunia dengan presentasi 3.0% dari total kasus terkonfirmasi (BNPB, 2020).

Dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19, pemerintah menjadi bagian penting karena berperan sebagai *leader*. Namun pemerintah juga membutuhkan berbagai solusi dari berbagai *stakeholder* karena bencana wabah COVID-19 merupakan masalah bersama. Semua pihak dituntut untuk berkerjasama atau kolaborasi guna

mencapai tujuan yang diharapkan yaitu, berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia (Cahyono, 2020:84). Menurut Emerson dkk, (2012:9) menggambarkan bahwa dalam mekanisme kolaborasi terdapat beberapa prinsip yang mewujudkan aktor di dalamnya memiliki visi dan misi yang sama. Prinsip-prinsip tersebut meliputi, *discovery, definition, deliberative* dan *determination*. Dari prinsip tersebut akan membangun *share meaning*, diskusi kelompok kepentingan dan pencapaian keputusan sebagai muara dari mekanisme kolaborasi. Ada berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dijadikan model percepatan penanganan wabah COVID-19 seperti, model *tripelhelix*, model *quadruplehelix* dan model *pentahelix*.

Dari ketiga model yang disebutkan sebelumnya, model kolaborasi *pentahelix* dianggap paling mumpuni untuk diimplementasikan dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Doni Monardo selaku Ketua Satgas COVID-19 yaitu, kolaborasi model *pentahelix* berbasis nilai-nilai kedaerahan atau kearifan lokal dapat dijadikan alternatif untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 (liputan6.com). Dalam kolaborasi model *pentahelix* terdapat lima unsur yang harus ada yaitu, pemerintah, pebisnis, komunitas masyarakat, akademisi dan juga media. Kolaborasi model *pentahelix* dipercaya dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara lebih cepat sehingga tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pada saat atau pasca terjadinya bencana (Rizkiyah dkk, 2019:249).

Menurut Jahid (2019) memaparkan bahwa, sejarah perkembangan konsep kolaborasi model *pentahelix* dimulai dari dicetuskannya gagasan mengenai kolaborasi model *triplehelix* yang diambil dari teori Etzkowitz & Leydesdorff pada tahun 2000. Teori *triplehelix* ini dapat terwujud apabila adanya kolaborasi antara pemerintah, pebisnis dan akademisi. Setelah itu pada tahun 2014 Lindberg menambahkan unsur komunitas masyarakat ke dalam teori kolaborasi model *triplehelix* sehingga muncul model kolaborasi baru yaitu, *quadruplehelix*. Setelah kolaborasi model *quadruplehelix* masuk ke Indonesia, selanjutnya pada tahun 2016 mantan Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan unsur media hingga tercipta model kolaborasi lain yaitu, *pentahelix*.

Penambahan unsur media yang dilakukan Arief Yahya bermula dari sebuah pemikiran untuk menciptakan model sinergitas pengembangan pariwisata yang melibatkan lima unsur yang terdiri dari *governance, bussines, comonity, akademy* dan *media* (GBCAM). Pemikiran tersebut akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomer 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Konsep *Pentahelix* (Aribowo dkk, 2018:33). Kolaborasi model *pentahelix* di Indonesia memang pada awalnya ditujukan

untuk pengembangan sektor pariwisata, namun sejatinya model kolaborasi ini juga dapat diimplementasikan disegala sektor termasuk dalam upaya penanganan bencana seperti wabah COVID-19. Adanya unsur pebisnis, komunitas masyarakat dan media berperan penting dalam upaya sosialisasi program atau kebijakan yang telah dirumuskan, selain itu juga dapat memberikan dampak sosial-ekonomi kepada masyarakat sekitar (Maturbongs, 2020:56).

Menurut Soemaryani dalam Syaharbanu (2019:5) Setiap unsur dalam kolaborasi model *pentahelix* memiliki fungsi masing-masing yang sesuai dengan kapasitasnya. Fungsi-fungsi tersebut yang nantinya akan menciptakan interaksi antar tiap unsur hingga terwujudlah sebuah kolaborasi. Pertama fungsi unsur pemerintah sebagai regulator, koordinator dan kontroler, dengan fungsi tersebut menjadikan pemerintah terlibat dalam semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, penganggaran, perizinan program, perundang-undangan hingga pengembangan kebijakan publik. Kedua fungsi unsur pebisnis sebagai penyokong atau penyedia infrastruktur, pengembang sumber daya manusia serta sebagai promotor yang turut menyokong anggaran membantu pemerintah. Ketiga fungsi unsur akademisi sebagai konseptor seperti, melakukan perumusan standar terhadap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan. Akademisi juga sebagai sumber pengetahuan dan teori-teori yang relevan agar kebijakan yang dirumuskan berjalan dengan efektif dan efisien. Keempat fungsi unsur komunitas masyarakat sebagai akselelator, dimana komunitas masyarakat disini adalah sekumpulan yang memiliki tujuan yang sama untuk dicapai. Komunitas masyarakat juga memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat kepada pemangku kebijakan. Kelima fungsi unsur media sebagai publikator atas kebijakan atau program yang tengah dilakukan, unsur media menjadi aktor yang krusial dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 karena mampu mempengaruhi beberapa hal seperti, psikologis masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dapat mempengaruhi opini publik.

Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan Doni Monardo sebelumnya yang memprioritaskan kolaborasi model *pentahelix* dengan pendekatan kedaerahan maka menjadikan pemerintah daerah harus memiliki kesiapan sebagai *leader* dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di daerahnya masing-masing. Hal ini juga selaras dengan cita-cita Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip yang seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya. Dari hal tersebut, menjadi sebuah implikasi bahwa daerah semakin memiliki tanggungjawab

dan tuntutan yang besar untuk lebih maksimal dalam memanfaatkan sumber daya daerah untuk menopang kehidupan masyarakatnya dalam segala urusan termasuk kesehatan (Syahputra dkk, 2020:3). Beberapa alasan bahwa daerah memegang peran penting dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 yaitu, pertama hampir seluruh daerah di Indonesia telah terjangkit. Kedua, belum adanya kebijakan yang dapat menahan laju mobilitas masyarakat lintas kota/provinsi. Ketiga, tren kenaikan mobilitas masyarakat ke daerahnya masing-masing yang merupakan imbas kebijakan WFH. Keempat adanya perbedaan persepsi di setiap daerah terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Maka dari itu perlu adanya penguatan peran pemerintah daerah sebagai *leader* dalam percepatan penanganan wabah COVID-19 (Dzakwan, 2020:6).

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang penyebaran virus COVID-19 masih mengalami peningkatan, sehingga pada bulan Desember 2020 status Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai zona merah. Kasus terkonfirmasi per 23 Desember 2020 sebanyak 1079 kasus dengan rincian 236 masih dalam perawatan, 756 sembuh dan 87 meninggal. Dengan status zona merah ini, gugus tugas Kabupaten Bojonegoro kembali menerapkan aturan jam malam guna menekan angka penyebaran virus COVID-19. Setidaknya ada lima kecamatan yang memiliki angka kasus tertinggi yaitu, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Dander, Kecamatan Baureno, Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan Balen dengan rentang usia 50-54 tahun (detiknews.com).

Kondisi penyebaran virus COVID-19 di Bojonegoro yang terus meningkat memberikan sinyal bahwa upaya penanganan harus terus dilakukan dengan maksimal sebelum semakin menjadi lebih parah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengedepankan kolaborasi model *pentahelix*. Dalam kerangka kolaborasi model *pentahelix*, terdapat berbagai aktor yang memiliki peran penting dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro diantaranya adalah, Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Dalam SK Bupati Bojonegoro No. 188/107/KEP/412.013/2020 tentang Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non-Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dijelaskan bahwa, BPBD bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan Bencana wabah COVID-19, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan operasi darurat serta menyusun pedoman operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana non-alam. Sedangkan masih pada SK yang sama, Dinas Kesehatan bertugas untuk melakukan koordinasi dan mengendalikan kegiatan sub-satgas seperti personil, perlengkapan, penyusunan

kegiatan, hal-hal berhubungan dengan masyarakat (Kehumasan) dan protokol terkait penanganan wabah COVID-19. BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro mengisi unsur pemerintah pada kolaborasi model *pentahelix*, yang berarti kedua *stakeholder* tersebut menjadi *leading* untuk mengkoordinasikan keempat unsur lain, namun tetap harus berdasarkan arahan Bupati Bojonegoro selaku ketua Satgas COVID-19 daerah.

Unsur media juga nampak memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya, hal ini bisa dilihat dari masifnya media-media yang ada di Kabupaten Bojonegoro baik cetak maupun elektronik dalam memberikan *update* informasi seputar pandemi COVID-19, hal ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap psikologis masyarakat dan menggiring opini masyarakat agar tidak termakan berita bohong tentang COVID-19. Berikutnya unsur komunitas masyarakat juga turut dilibatkan dan memiliki andil dalam memerangi wabah COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro. pelibatan masyarakat terlihat dengan adanya kegiatan penertiban jam malam di hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

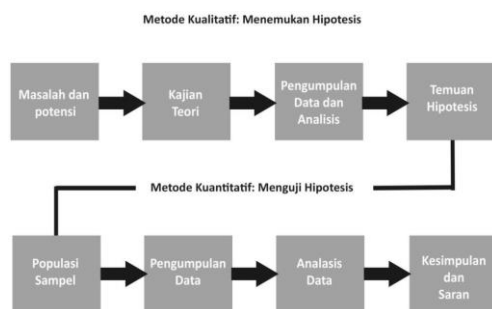
Namun unsur akademisi dan unsur bisnis nampaknya belum terlihat kontribusinya. Padahal unsur akademis memiliki peran yang sangat penting, karena melalui kajian yang dilakukan para akademisi upaya dan strategi penanganan bencana wabah COVID-19 yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro akan dapat berjalan secara lebih efektif. Sedangkan dengan adanya unsur bisnis akan mampu memberikan sokongan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, maupun anggaran terhadap pemerintah, karena pada dasarnya unsur bisnis memiliki tanggungjawab filantropi yang menuntut para pebisnis harus dapat memberikan kontribusi nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

Dari penjabaran di atas secara keseluruhan, membangkitkan ketertarikan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan masukan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Bojonegoro, akan pentingnya penerapan skema kolaborasi model *pentahelix* untuk memaksimalkan peran *stakeholder* daerah dalam rangka mendukung percepatan penanganan bencana wabah COVID-19.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methode*) model *sequential exploratory*. Metode ini merupakan metode penelitian yang memuat dua metode didalamnya yaitu, metode kualitatif dan kuantitatif serta diterapkan secara urut.

(Sugiyono, 2018:415). Model *sequential exploratory* dipilih untuk mendapatkan kevalidan data mengenai implementasi kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan COVID-19 di Bojonegoro. Dimana tahap kualitatif digunakan untuk menggali data dari *stakeholder* daerah Bojonegoro dalam kerangka kolaborasi model *pentahelix*. Sedangkan tahapan kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat akan peran *stakeholder* daerah tersebut karena masyarakat merupakan validator eksternal yang dapat menjadi sampel yang bersifat netral. Berikut gambaran alur penelitian menggunakan metode *sequential exploratory*.



Gambar 1. Alur Penelitian Sequential Exploratory

Sumber: Sugiyono (2018:416)

Tahapan Kualitatif

Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Informan kunci dalam tahap ini adalah dari unsur pemerintah yaitu, pihak BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dengan pertimbangan kedua aktor tersebut merupakan *leading* dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Bojonegoro, dengan kata lain kedua pihak tersebut memiliki fungsi koordinator di dalam kolaborasi model *pentahelix*. Selanjutnya data akan menggali ke informan lain hingga aktor dari keempat unsur dalam kolaborasi model *pentahelix* (pebisnis, akademisi, komunitas masyarakat, media) dapat terpenuhi dan diperoleh kecukupan data.

Pengumpulan data dilakukan selama 2 bulan mulai April 2021 hingga Mei 2021 (sebelum gelombang kedua penyebaran COVID-19 di Indonesia) dengan teknik wawancara semiterstruktur. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan instrumen wawancara yang telah dibuat berdasarkan indikator fungsi tiap unsur dalam teori kolaborasi model *pentahelix*. Data yang dikumpulkan yaitu terkait implementasi fungsi dari tiap-tiap unsur dalam upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:334). Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, kegiatan analisis data harus dilakukan secara interaktif

dan berkelanjutan sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh akan lengkap.

Tahapan Kuantitatif

Dari hasil wawancara bersama informan yang menjadi sampel pada tahapan kualitatif, selanjutnya peneliti membuat hipotesis yang akan digunakan sebagai dasar membuat beberapa pernyataan untuk mengukur persepsi masyarakat terkait implementasi kolaborasi model *pentahelix* yang dilakukan *stakeholder* daerah Bojonegoro dalam upaya penanganan wabah COVID-19.

Populasi dari tahapan kuantitatif adalah masyarakat yang sedang tinggal di Bojonegoro (baik yang ber KTP/KK ataupun yang tidak ber KTP/KK Bojonegoro). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang benar-benar mengetahui kondisi nyata yang ada di Bojonegoro sehingga data yang terkumpul akan menjadi lebih objektif dan akurat. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Dikarenakan tidak diketahui berapa jumlah pasti masyarakat yang tinggal di Bojonegoro saat kuesioner disebar (baik yang ber KTP/KK ataupun yang tidak ber KTP Bojonegoro/KK), maka populasi dalam penelitian ini dikategorikan sebagai populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Untuk menentukan sampel dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya peneliti menggunakan rumus Cochran sebagai berikut (Sugiyono, 2018:128).

$$n = \frac{z^2 p q}{e^2}$$

Keterangan

n= Jumlah sampel yang dibutuhkan

z= Simpangan 5% dalam kurva normal/tingkat keyakinan 95%

p= Peluang benar 50% (0,5)

q= Peluang salah 50% (0,5)

e= Sampling error 10% (0,1)

Sehingga diperoleh ukuran sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,5)(0,5)}{(0,1)^2}$$

$$n = 96,04$$

$$n = 96$$

Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 96 sampel.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui *platform google form*, penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 12 Juni hingga jumlah sampel terpenuhi. Teknik analisis data menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur

pendapat, sikap atau persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang tengah atau telah terjadi (Sugiyono, 2018:136). Setelah hasil diperoleh selanjutnya data akan diolah dan diletakkan pada garis kontinum, dari situlah akan terlihat persepsi masyarakat positif, netral atau negatif.

Instrumen penelitian yang digunakan akan dibuat dalam bentuk pilihan ganda dengan jawaban yang memiliki bobot skor tertentu sebagai berikut.

Tabel 2. Bobot Jawaban

Kode Jawaban	Keterangan	Skor
ST	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Selanjutnya berdasarkan jawaban responden akan dihitung kecenderungannya berdasarkan skor yang telah diperoleh. Berikut merupakan rumus untuk menghitung kecenderungan dari jawaban responden.

Jumlah skor = $((F1 \times 1) + (F2 \times 2) + (F3 \times 3) + (F4 \times 4) + (F5 \times 5))$

Keterangan:

F1 = frekuensi responden menjawab ST

F2 = frekuensi responden menjawab TS

F3 = frekuensi responden menjawab RR

F4 = frekuensi responden menjawab S

F5 = frekuensi responden menjawab SS

Sedangkan rumus untuk menghitung nilai ideal (kriterium) pada garis kontinum sebagai berikut.

Nilai ideal (kriterium) = Jumlah responden x skor per item.

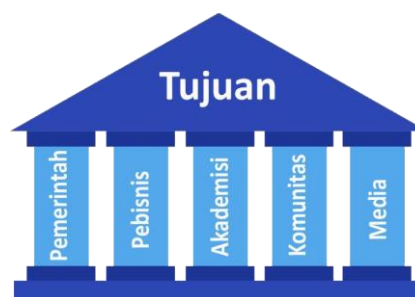
HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro tidak mungkin dapat dilakukan tanpa berkolaborasi dengan para *stakeholder* daerah lainnya. Konsep-konsep kolaborasi sejatinya memiliki tujuan agar pihak-pihak diluar pemerintahan seperti masyarakat dan sektor bisnis dapat berpartisipasi dalam menentukan arah dari sebuah kebijakan atau sebuah program (Machruf dkk, 2020:130). Selain untuk melibatkan pihak lain diluar pemerintahan, masalah bencana wabah COVID-19 juga bukan sebuah masalah yang dapat dikelola dengan efektif oleh pemerintah daerah saja, melainkan dibutuhkan suatu mekanisme yang berbeda dan lebih fleksibel.

Ada berbagai model kolaborasi yang dapat digunakan, namun saat ini yang paling ideal adalah

kolaborasi model *pentahelix*, yang juga sesuai dengan arahan Doni Monardo selaku ketua Satgas COVID-19. Salah satu dampak positif pengimplementasian kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan wabah COVID-19 adalah adanya pelibatan berbagai unsur seperti komunitas masyarakat. Adanya komunitas masyarakat dapat menjadi akselerator dari tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena komunitas masyarakat dapat mempercepat penyampaian program terkait upaya penanganan wabah COVID-19 di Bojonegoro kepada masyarakat, sehingga akan mampu membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah yang sedang terjadi, serta patuh pada dan turut serta menyelesaikan program yang telah dikeluarkan pemerintah. Selaras dengan S Halibas dkk, (2017:162) yang memaparkan bahwa kolaborasi *pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan bersama.

Menurut Aribowo (2018:33) kolaborasi model *pentahelix* adalah acuan pengembangan kerjasama antar instansi guna mencapai tujuan yang ditargetkan. Setiap unsur memiliki fungsi masing-masing dimana dari fungsi tersebut akan menciptakan interaksi kolaborasi. Unsur pertama adalah pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, koordinator dan kontroler. Unsur kedua adalah pebisnis berfungsi sebagai penyedia infrastruktur, pengembang SDM serta menyokong sarana prasarana hingga pendanaan. Unsur ketiga adalah komunitas, berfungsi sebagai akselerator, atau penghubung antara masyarakat kepada pemangku kepentingan. Unsur keempat adalah akademisi, berfungsi sebagai pengonsek. Unsur kelima adalah media, berfungsi sebagai aktor yang mendukung publikasi atas tujuan yang ingin dicapai.



Gambar 2. Skema Kolaborasi Model Pentahelix

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Selanjutnya pada tataran implementasi program dan kebijakan terdapat berbagai aktor yang dilibatkan. Setiap unsur memiliki aktor dari berbagai kalangan seperti, unsur pemerintah aktornya bisa dari kalangan birokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif atau lembaga peradilan. Unsur akademisi dapat dari kalangan guru, mahasiswa atau peneliti. Unsur bisnis bisa dari sektor industri, perbankan atau konsumers. Unsur komunitas masyarakat dapat berasal dari kelompok penekan atau organisasi

masyarakat. Serta unsur media dapat berasal dari media cetak ataupun media digital yang tidak memiliki aviliasi denga pemerintah (Yuningsih dkk, 2019:87). kemudian untuk aktor yang terlibat pada hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Identifikasi Sampel Aktor yang Terlibat

Aktor-aktor yang terlibat dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro melalui model *pentahelix* pastinya memiliki tujuan yang sama. Baik dari unsur pemerintah, bisnis, akadmi, komunitas masyarakat dan media saling berkolaborasi agar wabah COVID-19 bisa ditangani dengan baik.

Untuk menentukan sampel aktor yang terlibat dari setiap unsurnya, terlebih dahulu ditentukan aktor dari unsur pemerintah yang selanjutnya dilakukan penggalan melalui metode wawancara. Penentuan ini didasari dari indikator fungsi unsur pemerintah dalam teori kolaborasi model *pentahelix* yang meliputi, koordinator, regulator dan kontroler. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa, BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro memiliki peran sentral dan menjadi *leading* dalam upaya penanganan bencana wabah Covid-19 di Bojonegoro. Sehingga untuk menentukan keempat unsur lain dan aktornya didasari dari hasil wawancara kedua instansi tersebut. Berikut adalah narasumber dari BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojoengoro.

Tabel 3. Narasumber Dari Unsur Pemerintah

Instansi	Narasumber	Jabatan
BPBD Kab. Bojonegoro	Zaenul Ma'arif	Sekretaris BPBD
Dinkes Kab. Bojonegoro	Imam Wahyudi	Kasi Surveilans dan Imuniasis

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Hasil wawancara dengan kedua narasumber dari unsur pemerintah tersebut diketahui bahwa, dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro memang diupayakan mengimplementasikan kolaborasi model *pentahelix*. BPBD dan Dinas Kesehatan bereperan sebagai *leading* dibawah arahan Bupati selaku ketua Satgas COVID-19 Bojonegoro. Dijelaskan bahwa, dengan pendekatan model kolaborasi tersebut akan mampu menambah efektifitas upaya penanganan yang dilakukan. Kolaborasi juga dilakukan dengan instansi pemerintah/SKPD lain, karena pada dasarnya semua instansi di lingkungan pemerintah daerah Bojonegoro wajib melibatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki mulai dari sarana prasarana, personil hingga anggaran dalam menangani wabah COVID-19.

Dari wawancara yang dilakukan baik narasumber yang mewakili BPBD atau Dinas Kesehatan menyebutkan beberapa aktor dari keempat unsur lain (akdemisi, pebisnis, komunitas masyarakat, media), kemudian dari beberapa opsi tersebut peneliti menentukan satu aktor dari tiap unsur sebagai sampel untuk kemudian dilakukan penggalan data melalui wawancara. Berikut aktor yang peneliti pilih sebagai narasumber.

Tabel 4. Identifikasi Narasumber

Unsur	Narasumber	Jabatan/Posisi
Akademisi	Dhio Awalia Kusuma	Pengajar TK Dharma Wanita Nusa Indah/Mahasiswa PGPAUD UT
Bisnis	Rini Sulisti	Staff admin prduksi Pt. Sariguna Primatirta Tbk (Cleo)
Komunitas Masyarakat	Priyono	Ketua KRI Bojonegoro (Komunitas Relawan Independent)
Media	Bagas Dani Purwoko	Wartawan Surat Kabar Radar Bojonegoro

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

b. Fungsi Unsur yang Terlibat Unsur Pemerintah

Unsur pemerintah pada dasarnya menjadi unsur yang paling bertanggungjawab dalam implemnetasi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah, begitupun juga dalam seluruh program dan kebijakan terkait penanganan wabah COVID-19 di Bojoengoro. Unsur pemerintah mempunyai wewenang yang besar dan sepenuhnya memegang kuasa dalam kebijakan yang diimplementasikan di areaanya. Ditinjau dari kolaborasi model *pentahelix* unsur pemerintah memiliki fungsi sebagai koordinator, regulator dan kontroler. Dari hasil penelitian melalui metode wawancara yang dilakukan dengan unsur pemerintah, dalam hal ini BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro didapati hasil sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Zaenul Ma'arif (Sekertaris BPBD) dan Bapak Imam Wahyudi (Kasi Surveilans dan Imnunisasi) menunjukkan bahwa, unsur pemerintah baik BPBD dan Dinas Kesehatan telah berupaya melakukan koordinasi dengan keempat unsur

lain dalam model *pentahelix*. Bentuk koordinasi berbeda-beda pada setiap unsurnya. Untuk koordinasi dengan unsur akademisi dominannya lebih kearah komunikasi dengan satuan pendidik di wilayah Bojonegoro terkait proses pembelajaran selama pandemi. Serta tak jarang para guru juga memberikan masukan melalui kajian yang sudah mereka lakukan terkait hal tersebut. Minimnya kolaborasi dengan unsur akademisi dikarenakan Bojonegoro belum memiliki fasilitas penunjang sebagai tempat akademisi untuk berkontribusi seperti, tidak adanya fasilitas penelitian virus COVID-19.

Koordinasi dengan unsur bisnis yang meliputi pusat perbelanjaan, industri dan perbankan dilakukan dalam bentuk sosialisasi terkait protokol pada operasional perusahaan selama masa pandemi. Selain hal tersebut unsur bisnis juga memberikan bantuan sarana maupun prasarana melalui mekanisme CSR yang mereka miliki.

Koordinasi dengan unsur komunitas masyarakat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam upaya edukasi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat selama pandemi. Komunitas masyarakat menjadi unsur yang paling dekat dengan masyarakat sehingga menjadikan proses penyampaian program atau kebijakan dalam penanganan COVID-19 dapat menjadi lebih cepat. Tak jarang komunitas masyarakat juga terlibat pada program unsur pemerintah seperti kegiatan pembatasan jam malam atau penyempotan gas desinfektan.

Koordinasi dengan unsur media (diluar media pemerintah) menjadi krusial, karena media dapat berperan sebagai pembentuk opini masyarakat. Banyaknya *hoax* yang tersebar ditengah masyarakat terkait wabah COVID-19 menjadikan unsur pemerintah wajib selalu berkoordinasi dengan unsur media dalam rangka memerangi *hoax* tersebut. Melalui unsur media cetak maupun digital yang ada di Bojonegoro, informasi terkait COVID-19 berusaha di sampaikan seakurat mungkin agar tidak menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran ditengah masyarakat.

Berikutnya dari fungsi regulator, pemerintah Bojonegoro telah membuat kebijakan yang memiliki kontribusi secara signifikan dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19. Pada awal penyebaran, Bojonegoro langsung mengambil langkah sigap dengan melakukan *tracking* secara detail dan ketat dengan metode *rapid test*, dan menyasar tempat-tempat/fasilitas yang menjadi pusat kerumunan seperti pasar, bahkan proses *tracking* yang dilakukan di Bojonegoro menjadi salah satu proses terdetail dan rumit di Provinsi Jawa Timur. Selain itu kebijakan rumah isolasi juga berperan dalam upaya memberikan layanan kesehatan terkait virus COVID-19 disetiap desa dan masih ada beberapa kebijakan lain. Seluruh program atau kebijakan yang

dilakukan pemerintah daerah Bojonegoro telah memberikan dampak positif dan dapat terlihat dari data yang menunjukkan bahwa, Kabupaten Bojonegoro sudah menjadi zona kuning menuju ke zona hijau per 20 Mei 2021 (sebelum gelombang kedua penyebaran COVID-19 di Indonesia).

Selanjutnya adalah fungsi kontroler, fungsi ini penting agar kebijakan yang telah dikeluarkan tidak keluar dari tujuan awalnya dan tetap dilaksanakan secara maksimal. Salah satu bentuk kontrol termanifestasikan dalam kegiatan operasi yustisi yang dinaungi oleh Kodim dan Polres. Operasi yustisi bertujuan untuk menertibkan pelanggaran dan mensosialisasikan kembali kebijakan yang sudah ada.

Unsur Akademisi

Hasil wawancara dengan Ibu Dhio Awalia Kusuma (Pengajar TK Dharwa Wanita Nusa Indah/Mahasiswa Prodi PGPAUD Universitas Terbuka) menunjukkan bahwa, fungsi konseptor masih dilakukan walaupun hanya pada tataran pelaksanaan kegiatan belajar selama pandemi. Pemerintah Bojonegoro mengeluarkan intruksi bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, namun hasil wawancara menunjukkan tidak semua sekolah menerima mentah-mentah intruksi tersebut. Salah satunya adalah narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa, dia selaku pengajar di salah satu taman kanak-kanak tetap harus memperhatikan 6 aspek perkembangan anak dan apabila pembelajaran dilakukan secara daring aspek-aspek tersebut tidak dapat tercapai. Maka dari itu narasumber menjelaskan bahwa dia dan kelompok pengajar taman kanak-kanak di wilayah Kecamatan Nggondang punya strategi sendiri, disisi lain tidak melanggar protokol dan sisi lain 6 aspek perkembangan anak yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi yang narasumber lakukan disebut GULING (Guru keliling), dimana guru berkunjung kerumah siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Tentunya strategi ini telah disetujui oleh Koordinator wilayah kecamatan Nggondang. Disamping itu melalui kegiatan pembelajaran narasumber juga melakukan edukasi terkait virus COVID-19 kepada anak-anak didiknya.

Unsur Bisnis

Hasil wawancara dengan Ibu Rini Sulisti (Staff Admin Produksi Pt. Sariguna Primatirta Tbk/Cleo) mengatakan bahwa, perusahaan telah berupaya melakukan fungsinya sebagai supporter dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Bojonegoro. Kontribusi yang perusahaan berikan utamanya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pada operasional perusahaan selama masa pandemi. Dimana perusahaan dengan aktif memastikan seluruh karyawan bekerja

dengan protokol kesehatan secara ketat sesuai apa yang telah diinstruksikan pemerintah daerah Bojonegoro. Selain itu perusahaan juga telah melakukan *tracking* terhadap seluruh karyawan dengan melakukan *test rapid antigen*, dan untuk sekarang perusahaan masih mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan vaksinasi terhadap seluruh karyawan. Dari kantor pusat juga memberikan distribusi vitamin kepada para karyawan agar meningkatkan imunitas mereka. Hal-hal tersebut dilakukan agar perusahaan kami tidak menjadi *cluster* penyebaran virus COVID-19. Perusahaan juga pernah memberikan bantuan bahan makanan kepada warga sekitar. Semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan sebagai sektor bisnis yang juga memiliki tanggungjawab sosial.

Unsur Komunitas Masyarakat

Unsur komunitas masyarakat memiliki fungsi sebagai akselerator atau mempercepat tujuan program atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Priyono (Ketua Komunitas Relawan Independent/KRI Bojonegoro) menyatakan bahwa, dalam upaya penanganan wabah COVID-19 KRI telah turut berkontribusi aktif utamanya dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran mereka akan bahaya wabah COVID-19. Tak jarang pula KRI juga melaksanakan kegiatan-kegiatan penyemprotan secara mandiri ke lingkungan sekitar. KRI juga aktif memberikan bantuan personil kepada pihak-pihak terkait seperti, BPBD dan Damkar pada kegiatan terkait penanganan wabah COVID-19 di Bojonegoro.

Unsur Media

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bagas Dani Purwoko (Wartawan Surat Kabar Radar Bojonegoro) memperlihatkan bahwa, fungsi publikator telah dilakukan. Narasumber menyatakan bahwa, Radar Bojonegoro selalu aktif menginformasikan perkembangan wabah COVID-19 dari awal penyebaran hingga saat ini, khususnya informasi yang ada di Bojonegoro. Narasumber juga menyatakan bahwa, informasi yang dikeluarkan akan membuat masyarakat lebih waspada diri dan menjaga kesehatan di masa pandemi. Berita yang dikeluarkan bukan untuk menakuti, namun lebih untuk membuka pikiran pembaca bahwa COVID-19 bukan sesuatu yang dapat diremehkan tetapi juga bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Dalam mengeluarkan pemberitaan terkait COVID-19 diperhatikan juga mengenai dampak psikologis pembaca, oleh karena itu sebisa mungkin untuk menghindari diksi yang ambigu atau diksi yang bersifat hiperbola. Selain itu, Radar Bojonegoro juga selalu berkoordinasi dengan

intansi pemerintah terkait seperti, BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan sinkronisasi data, hal itu dilakukan agar berita yang dikeluarkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran media semakin penting sebagai penetralisir ditengah maraknya *hoax* saat ini. Memang belum sepenuhnya dapat memerangi hal tersebut, karena tipe pembaca itu berbeda-beda dan pasti memiliki interpretasi yang berbeda pula dalam menyikapi sebuah informasi. Namun pastinya informasi yang telah dikeluarkan oleh Radar Bojonegoro memiliki *impact* entah itu sedikit atau banyak dalam memerangi *hoax*, khususnya mengenai wabah COVID-19.

Temuan dan Hipotesis Awal

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui status indikator fungsi dari setiap unsur kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro sebagai berikut.

Tabel 5. Status Indikator fungsi Kolaborasi Pentahelix

Unsur	Sampel Aktor	Fungsi	Status
Pemerintah	BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro	Koordinator	Terimplementasi
		Regulator	Terimplementasi
		Kontroler	Terimplementasi
Bisnis	Pt. Sariguna Primatirta Tbk (Cleo)	Supporter	Terimplementasi
Akademisi	Pengajar TK Dharma Wanita Nusa Indah	Konseptor	Terimplementasi
Komunitas Masyarakat	Komunitas Relawan Independent (KRI)	Akselerator	Terimplementasi
Media	Surat Kabar Radar Bojonegoro	Publikator	Terimplementasi

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil dan berdasarkan teori kolaborasi model *pentahelix* yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya diolah dan dideskripsikan dengan bantuan berbagai sumber, selanjutnya dibuat sintesis, dibuat juga kerangka berpikir dan digunakan sebagai landasan

merumuskan hipotesis. Sehingga berdasarkan itu semua dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

- Terdapat koordinasi Pemda dengan *stakeholder* daerah seperti akademisi, pebisnis, komunitas masyarakat dan media dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro.
- Terdapat regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan Pemda dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro.
- Adanya usaha mengontrol kebijakan oleh Pemda Bojonegoro dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro.
- Terdapat kontribusi akademisi (guru/pendidik) pada konsep pembelajaran selama pandemi dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro.
- Terdapat support dari sektor bisnis (industri, perbankan atau konsumers) dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro.
- Terdapat usaha percepatan penyampaian kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro.
- Terdapat publikasi informasi secara akurat dan dapat dibertanggungjawabkan oleh media cetak maupun digital dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro.

Dari rumusan hipotesis tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat instrumen guna menguji persepsi masyarakat terkait upaya *stakeholder* daerah dalam penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro melalui model kolaborasi *pentahelix*. Persepsi masyarakat sendiri diartikan sebagai sebuah respon masyarakat terhadap sebuah fenomena, isu atau kebijakan yang sedang terjadi (Firdiansyah, 2016:4).

Persepsi Masyarakat Terhadap *Stakeholder* Daerah Bojonegoro dalam Upaya Penanganan Bencana Wabah COVID-19 Melalui Kolaborasi Model *Pentahelix*

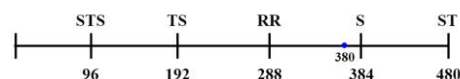
Pengujian persepsi masyarakat penting untuk dilakukan karena masyarakat sebagai target kebijakan menjadi validator eksternal untuk memperkuat data hasil wawancara yang sebelumnya dilakukan. Selain itu juga dapat mengetahui dampak dari pengorganisasian dan operasional *stakeholder* daerah pada kerangka kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Bojonegoro. Instrumen yang digunakan dalam bentuk beberapa butir pernyataan dan disebar melalui *google form* dan diperoleh hasil sebagai berikut.

Butir Pernyataan 1 “Pemerintah Bojonegoro aktif berkolaborasi atau melibatkan unsur diluar pemerintahan (Akademisi, Pebisnis, Komunitas Masyarakat, Media) dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19”.

$$\begin{array}{rcl} \text{Skor untuk 17 orang menjawab ST} & = & 17 \times 5 = 85 \\ \text{Skor untuk 61 orang menjawab S} & = & 61 \times 4 = 244 \\ \text{Skor untuk 15 orang menjawab RR} & = & 15 \times 3 = 45 \\ \text{Skor untuk 3 orang menjawab TS} & = & 3 \times 2 = 6 \\ \text{Skor untuk 0 orang menjawab STS} & = & 0 \times 1 = 0 \end{array}$$

$$\text{Jumlah skor} = 380$$

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 1. Pernyataan Satu

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 380 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 2 “*Stakeholder* daerah diluar pemerintah berkontribusi dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro”.

$$\begin{array}{rcl} \text{Skor untuk 14 orang menjawab ST} & = & 14 \times 5 = 70 \\ \text{Skor untuk 69 orang menjawab S} & = & 69 \times 4 = 276 \\ \text{Skor untuk 10 orang menjawab RR} & = & 10 \times 3 = 30 \\ \text{Skor untuk 3 orang menjawab TS} & = & 3 \times 2 = 6 \\ \text{Skor untuk 0 orang menjawab STS} & = & 0 \times 1 = 0 \end{array}$$

$$\text{Jumlah skor} = 382$$

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 2. Pernyataan Dua

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

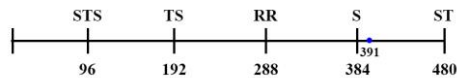
Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 382 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 3 “Pemerintah Bojonegoro telah baik dalam membuat berbagai kebijakan atau regulasi dalam upaya penanganan wabah COVID-19”.

$$\begin{array}{rcl} \text{Skor untuk 12 orang menjawab ST} & = & 12 \times 5 = 60 \\ \text{Skor untuk 69 orang menjawab S} & = & 64 \times 4 = 276 \\ \text{Skor untuk 15 orang menjawab RR} & = & 15 \times 3 = 45 \\ \text{Skor untuk 5 orang menjawab TS} & = & 5 \times 2 = 10 \\ \text{Skor untuk 0 orang menjawab STS} & = & 0 \times 1 = 0 \end{array}$$

$$\text{Jumlah skor} = 391$$

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 3. Pernyataan Tiga

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 391 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 4 “Kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Bojonegoro telah efektif diimplementasikan dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19”.

Skor untuk 9 orang menjawab ST = $9 \times 5 = 45$

Skor untuk 55 orang menjawab S = $55 \times 4 = 220$

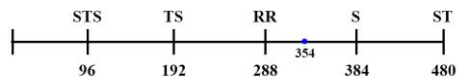
Skor untuk 25 orang menjawab RR = $25 \times 3 = 75$

Skor untuk 7 orang menjawab TS = $7 \times 2 = 14$

Skor untuk 0 orang menjawab STS = $0 \times 1 = 0$

Jumlah skor = 354

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 4. Pernyataan Empat

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 391 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 5 “Pemerintah Bojonegoro selalu melakukan kontrol program dan kebijakan tentang upaya penanganan wabah COVID-19”.

Skor untuk 12 orang menjawab ST = $12 \times 5 = 60$

Skor untuk 62 orang menjawab S = $62 \times 4 = 248$

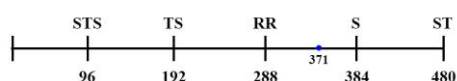
Skor untuk 19 orang menjawab RR = $19 \times 3 = 57$

Skor untuk 3 orang menjawab TS = $3 \times 2 = 6$

Skor untuk 0 orang menjawab STS = $0 \times 1 = 0$

Jumlah skor = 371

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 5. Pernyataan Lima

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 371 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 6 “Evaluasi terhadap kebijakan penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro bukan terhadap kebijakannya namun terhadap kesadaran masyarakat”.

Skor untuk 23 orang menjawab ST = $23 \times 5 = 115$

Skor untuk 60 orang menjawab S = $60 \times 4 = 240$

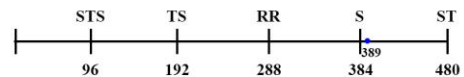
Skor untuk 8 orang menjawab RR = $8 \times 3 = 24$

Skor untuk 5 orang menjawab TS = $5 \times 2 = 10$

Skor untuk 0 orang menjawab STS = $0 \times 1 = 0$

Jumlah skor = 389

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 6. Pernyataan Enam

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 389 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 7 “Pengajar atau guru di wilayah Bojonegoro telah berkontribusi dalam penyesuaian konsep pembelajaran selama pandemi”.

Skor untuk 26 orang menjawab ST = $26 \times 5 = 130$

Skor untuk 58 orang menjawab S = $58 \times 4 = 232$

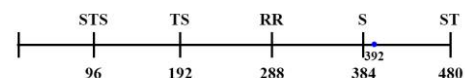
Skor untuk 7 orang menjawab RR = $7 \times 3 = 21$

Skor untuk 4 orang menjawab TS = $4 \times 2 = 8$

Skor untuk 1 orang menjawab STS = $1 \times 1 = 1$

Jumlah skor = 392

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 7. Pernyataan Tujuh

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 392 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 8 “Konsep pembelajaran selama masa pandemi di sekolah yang berada di wilayah Bojonegoro telah berjalan dengan baik dan efektif”.

Skor untuk 12 orang menjawab ST = $12 \times 5 = 60$

Skor untuk 48 orang menjawab S = $48 \times 4 = 192$

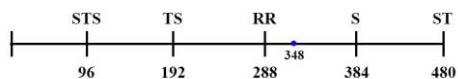
Skor untuk 25 orang menjawab RR = $25 \times 3 = 75$

Skor untuk 10 orang menjawab TS = $10 \times 2 = 20$

Skor untuk 1 orang menjawab STS = $1 \times 1 = 1$

Jumlah skor = 348

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:

**Garis Kontinum 8. Pernyataan Delapan**

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

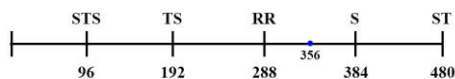
Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 348 dan terletak pada daerah ragu-ragu (RR).

Butir Pernyataan 9 “Sektor bisnis seperti industri, perbankan dan pusat perbelanjaan di Bojonegoro telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada saat operasional usaha selama masa pandemi”.

Skor untuk 11 orang menjawab ST = $11 \times 5 = 55$
 Skor untuk 57 orang menjawab S = $57 \times 4 = 228$
 Skor untuk 19 orang menjawab RR = $19 \times 3 = 57$
 Skor untuk 7 orang menjawab TS = $7 \times 2 = 14$
 Skor untuk 2 orang menjawab STS = $2 \times 1 = 2$

Jumlah skor = 356

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:

**Garis Kontinum 9. Pernyataan Sembilan**

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

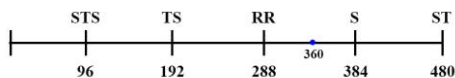
Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 356 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 10 “Sektor bisnis di wilayah Bojonegoro turut memberikan bantuan seperti infrastruktur, sarana prasarana atau bantuan sosial dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19”.

Skor untuk 8 orang menjawab ST = $8 \times 5 = 40$
 Skor untuk 59 orang menjawab S = $59 \times 4 = 236$
 Skor untuk 27 orang menjawab RR = $27 \times 3 = 81$
 Skor untuk 1 orang menjawab TS = $1 \times 2 = 2$
 Skor untuk 1 orang menjawab STS = $1 \times 1 = 1$

Jumlah skor = 360

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:

**Garis Kontinum 10. Pernyataan Sepuluh**

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

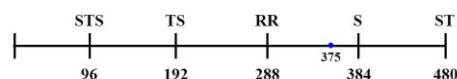
Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 360 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 11 Komunitas masyarakat turut serta mendukung kebijakan atau program yang dikeluarkan Pemerintah Bojonegoro dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19”.

Skor untuk 9 orang menjawab ST = $9 \times 5 = 45$
 Skor untuk 72 orang menjawab S = $72 \times 4 = 288$
 Skor untuk 12 orang menjawab RR = $12 \times 3 = 36$
 Skor untuk 3 orang menjawab TS = $3 \times 2 = 6$
 Skor untuk 0 orang menjawab STS = $0 \times 1 = 0$

Jumlah skor = 375

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:

**Garis Kontinum 11. Pernyataan Sebelas**

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

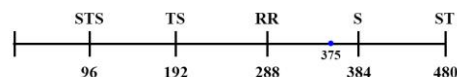
Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 375 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 12 “Komunitas masyarakat berkontribusi mensosialisasikan protokol kesehatan selama masa pandemi yang sudah diinstruksi

Skor untuk 13 orang menjawab ST = $13 \times 5 = 65$
 Skor untuk 64 orang menjawab S = $64 \times 4 = 256$
 Skor untuk 16 orang menjawab RR = $16 \times 3 = 48$
 Skor untuk 3 orang menjawab TS = $3 \times 2 = 6$
 Skor untuk 0 orang menjawab STS = $0 \times 1 = 0$

Jumlah skor = 375

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:

**Garis Kontinum 12. Pernyataan Duabelas**

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

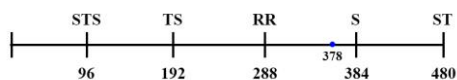
Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 375 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 13 “Sering terlihat berita atau informasi tentang perkembangan wabah COVID-19 yang dimuat oleh media yang ada di Bojonegoro baik media cetak/digital”.

Skor untuk 17 orang menjawab ST = $17 \times 5 = 85$
 Skor untuk 60 orang menjawab S = $60 \times 4 = 240$
 Skor untuk 15 orang menjawab RR = $15 \times 3 = 45$
 Skor untuk 4 orang menjawab TS = $4 \times 2 = 8$
 Skor untuk 0 orang menjawab STS = $0 \times 1 = 0$

Jumlah skor = 378

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 13. Pernyataan Tigabelas

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 378 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 14 “Berita atau informasi yang dikeluarkan media cetak/digital (diluar media pemerintah) yang ada di Bojonegoro tentang wabah COVID-19 akurat dan terpercaya”.

Skor untuk 13 orang menjawab ST = $13 \times 5 = 65$

Skor untuk 55 orang menjawab S = $55 \times 4 = 220$

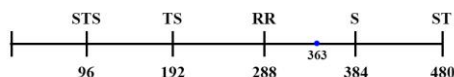
Skor untuk 23 orang menjawab RR = $23 \times 3 = 69$

Skor untuk 4 orang menjawab TS = $4 \times 2 = 8$

Skor untuk 1 orang menjawab STS = $1 \times 1 = 1$

Jumlah skor = 363

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 14. Pernyataan Empatbelas

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 363 dan terletak pada daerah setuju (S).

Butir Pernyataan 15 “Berita atau informasi yang dikeluarkan media cetak/digital (diluar media pemerintah) yang ada di Bojonegoro dapat menetralsisir hoax terkait virus COVID-19 dan tidak menimbulkan kekhawatiran”.

Skor untuk 12 orang menjawab ST = $12 \times 5 = 60$

Skor untuk 58 orang menjawab S = $58 \times 4 = 232$

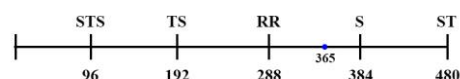
Skor untuk 23 orang menjawab RR = $23 \times 3 = 69$

Skor untuk 1 orang menjawab TS = $1 \times 2 = 2$

Skor untuk 2 orang menjawab STS = $2 \times 1 = 2$

Jumlah skor = 365

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut:



Garis Kontinum 15. Pernyataan Limabelas

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden maka rata-rata skor bernilai 365 dan terletak pada daerah setuju (S).

Dari yang digambarkan ke 15 garis kontinum secara keseluruhan memperlihatkan persepsi masyarakat Bojonegoro terhadap *stakeholder* daerah dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 terletak pada daerah setuju (S). Hal ini memberikan validasi bahwa upaya penanganan wabah COVID-19 di Bojonegoro memang menggunakan pendekatan kolaborasi model *pentahelix*. Namun dari gambaran garis kontinum ada satu butir pernyataan yang berada pada daerah ragu-ragu (RR) yaitu butir pernyataan ke 8 “Konsep pembelajaran selama masa pandemi di sekolah yang berada di wilayah Bojonegoro telah berjalan dengan baik dan efektif”. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran satuan pendidikan di wilayah Bojonegoro masih belum dirasa efektif oleh sebagian masyarakat hingga menimbulkan keragu-raguan. Namun tetap peran akademisi masih ada karena hasil persepsi masyarakat tentang pernyataan ke 7 “Pengajar atau guru di wilayah Bojonegoro telah berkontribusi dalam penyesuaian konsep pembelajaran selama pandemi” masih terletak pada daerah setuju (S) pada garis kontinum. Dengan kata lain masyarakat sepakat bahwa guru yang masuk sebagai unsur akademisi memiliki peran dalam mengkonsep sistem pengajaran selama pandemi, tetapi hanya saja dalam implementasi konsep belum dapat berjalan secara efektif.

PENUTUP

Simpulan

- Kolaborasi model *pentahelix* memang diimplementasikan dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, dimana telah melibatkan kelima unsurnya yaitu: pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas masyarakat dan media. Hal ini didasari dari hasil penelitian yang meliputi wawancara dengan sampel aktor dari setiap unsur dan divalidasi oleh masyarakat sebagai validator eksternal.
- Evaluasi kebijakan tentang penanganan bencana wabah COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro lebih kepada meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Temuan dari hasil validasi eksternal oleh masyarakat menunjukkan adanya kontribusi akademisi (guru) dalam proses mengkonsep sistem pembelajaran selama masa pandemi, namun dalam tataran implementasi menimbulkan keragu-raguan mengenai keefektifan konsep.

Saran

Pembelajaran daring selama masa pandemi memang masih banyak menuai pro dan kontra, utamanya jika berbicara mengenai keefektifannya. Pembelajaran secara

daring selama ini dominannya hanya memanfaatkan bantuan *platform digital* seperti, *google classroom*, *google meet*, *zoom* dan *whatsapp* dengan dukungan subsidi kuota internet belajar dari Pemerintah. Padahal tidak semua daerah di Bojonegoro memiliki kekuatan jaringan internet yang kuat. Keefektifan pembelajaran daring di Bojonegoro juga mendapatkan respon keraguan-raguan dari masyarakat, hal ini dibuktikan dari hasil pengukuran persepsi masyarakat yang telah dilakukan peneliti. Dari temuan tersebut peneliti berusaha memberikan beberapa saran yang masih berkaitan dengan kolaborasi model *pentahelix* sebagai berikut.

- a. Melakukan pembelajaran luring melalui skema Guru Keliling (GULING) dengan penerapan proses ketat seperti yang dilakukan Ibu Dhio Awalita Kusuma (narasumber unsur akademisi) di daerah yang tidak rawan COVID-19 dan memiliki jaringan internet yang kurang memadai. Selain itu dibentuk juga tenaga “Pendidik Darurat” yang diambil dari unsur akademisi lain yaitu mahasiswa yang memiliki *skill* mengajar. Hal tersebut penting dilakukan dengan alasan sebagai berikut.
 1. Untuk melakukan kegiatan GULING akan lebih baik tidak mengikut sertakan para guru yang sudah berumur karena sangat beresiko. Maka dari itu “Pendidik Darurat” dari kalangan mahasiswa dapat mengisi posisi tersebut.
 2. Jika biasanya satu kelas hanya dipegang oleh satu guru maka dengan adanya penambahan sumber daya pendidik dari pembentukan “Pendidik Darurat” satu kelas dapat dipegang oleh lebih dari satu pendidik. Hal ini akan dapat memecah siswa ke dalam beberapa kelompok belajar yang lebih kecil sehingga tidak menimbulkan kerumunan dalam implementasi GULING untuk pembelajaran luring di dua wilayah yang disebutkan sebelumnya.
- b. Pemerintah Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan (Dindik) melakukan pengakajian untuk membuat rancang bangun sebuah *platform digital* yang difungsikan untuk menunjang pembelajaran daring di wilayah rawan COVID-19 dan memiliki jaringan internet yang memadai. Pemanfaatan *platform digital* seperti, *google classroom*, *google meet*, *zoom* dan *whatsapp* untuk menunjang pembelajaran daring selama ini mungkin bekerja baik untuk tataran SMP, SMA dan Perguruan Tinggi namun tidak dengan tataran TK dan SD yang memerlukan sebuah media pembelajaran yang lebih menarik. Oleh karena itu peneliti menyarankan dilakukan sebuah rancang bangun *platform digital* sebagai media pembelajaran yang multifungsi yang disesuaikan dengan psikomotorik siswa. Dindik Bojonegoro dapat

bekerjasama dengan para akademisi dari jurusan Teknik Informatika UNUGIRI Bojonegoro.

- c. Komunitas yang ada di Bojonegoro dapat melakukan sebuah penggalangan dana dari masyarakat melalui *platform digital* dengan konsep gotong royong. Hasil galang dana dapat diperuntukkan untuk memberi bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 dari sisi ekonomi. Dengan skema tersebut akan memperkuat fungsi akselelator dalam kolaborasi model *pentahelix* dari komunitas masyarakat. Dimana bukan hanya menjadi akselelator program atau kebijakan pemerintah namun juga menjadi akselelator dalam pemulihan ekonomi masyarakat Bojonegoro. Hal ini juga akan menciptakan kemandirian masyarakat daerah dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1), 31–38.
- BNPB. (2020). Situasi Virus Corona di Indonesia. <https://www.covid19.go.id/>. Diakses Pada 14 November 2020.
- Barua, S. (2020). Understanding Coronanomics: The Economic Implications of the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. *SSRN Electronic Journal*, 1–44.
- Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 83–88.
- Dzakwan, M. H. A. (2020). Mapping Local Government Readiness in Handling COVID-19. *CSIS Commentaries*, 27(21), 1–11.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Firdiansyah. (2016). Analisis Dampak Implementasi Kebijakan dan Persepsi Masyarakat tentang Ahli Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(3), 1–11.
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, Tourism and Global Change: a Rapid Assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20.

- Harsono .(2020). Tekan Kasus COVID-19, Gugus Tugas Gunakan Strategi Kolaborasi pentahelix Berbasis kearifan Lokal. <https://www.liputan6.com/health/read/4298579/tekan-kasus-covid-19-gugus-tugas-gunakan-strategi-kolaborasi-pentahelix-berbasis-kearifan-lokal>. Diakses Pada 12 November 2020.
- Jahid, Jamaludin (2019). Destinasi Wisata: Butuh Sinergi dan {eran Penta Helix. Diakses dari: <https://fajar.co.id/2019/06/17/destinasi-wisata-butuh-sinergi-dan-peran-penta-helix/amp>. Diakses Pada 14 Juli 2021.
- Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Putusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kbupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Coolaborative Governance. *Jurnal Birkorasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 129-146.
- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63.
- Megasari, R., Vidyastuti, A. N., Setya, E., Rahayu, P., & Pangestu, O. (2020). Upaya Memutus Penyebaran Virus Covid-19 Melalui Pembentukan Kampung Tangguh Semeru Di Desa Tegalsari Kabupaten Malang. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(3), 212–222.
- Rizkiyah, P., Liyushiana, L., & Herman, H. (2019). Sinergitas Pentahelix Dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Jurnal IPTA*, 7(2), 247.
- Rofiq. (2020). Bojonegoro Jadi Zona Merah COVID-19, Jam Malam Kembali diterapkan.<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5305588/bojonegoro-jadi-zona-merah-covid-19-jam-malam-kembali-diberlakukan>. Diakses Pada 24 Desember 2020.
- S Halibas, A., Ocier Sibayan, R., & Lyn Maata, R. (2017). The Pentahelix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12(12), 159–174.
- SK Bupati Bojonegoro No. 18/107/KEP/412.013/2020 Tentang Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non-Alam dan Percepatan Penanganan Coronona Virus Diesase (Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunuantari, M. (2020). Komunikasi dan Community Empowerment Tata Kelola Black Zone Covid-19 Berbasis Komunitas. *Jurnal Melbs*, 17(8),1-10.
- Syahrbanu A. (2019). Analisis Colaborative Leadership dengan Model Pentaheliks Terhadap Permasalahan Depresiasi Rupiah di Indonesia. 53(9), 1689–1699.
- Syahputra, K. A., Negara, S.-I. A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Farid, M., Sos, S., & Ap, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, Dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar). *Publika*, 8(4), 1–10.
- Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84.

